

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah disusun dalam rangka memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi, sosial dan lingkungan dalam lingkup daerah, regional dan global yang dihadapi, serta mampu mengoreksi kebijakan yang keliru.

Keinginan kuat dari pemerintah daerah untuk membuat strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi daerah dapat membuat masyarakat ikut serta membentuk bangun ekonomi daerah yang dicita-citakan. Dengan pembangunan ekonomi daerah yang terencana, pembayar pajak dan penanam modal juga dapat tergerak untuk mengupayakan peningkatan ekonomi. Kebijakan pertanian yang mantap, misalnya, akan membuat pengusaha dapat melihat ada peluang untuk peningkatan produksi pertanian dan perluasan ekspor. Dengan peningkatan efisiensi pola kerja pemerintahan dalam pembangunan, sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, pengusaha dapat mengantisipasi bahwa pajak dan retribusi tidak naik, sehingga tersedia lebih banyak modal bagi pembangunan ekonomi daerah pada tahun depan.

Rancangan kerangka kebijakan ekonomi Pemerintah Kabupaten Kuningan tahun 2014 adalah sangat strategis dan dapat mewarnai penetapan arah pembangunan Kuningan 5 (lima) tahun kedepan yang akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2018.

3.1.1. Evaluasi Hasil Perumusan Masalah Pembangunan Daerah

Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Kebijakan pembangunan ekonomi tidak terpisah dan menampik permasalahan-permasalahan di luar kegiatan ekonomi karena tidak ingin adanya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kuningan berdampak buruk terhadap lingkungan hidup serta hanya dinikmati oleh beberapa golongan masyarakat saja. Hal ini juga selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang *pro-poor*, *pro-job*, *pro-growth* dan *pro-environment*. Masalah-masalah kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi serta kondisi

lingkungan hidup tetap menjadi dasar dalam rangka merumuskan kebijakan ekonomi Kabupaten Kuningan Ke depan.

Apabila dianalisis dari data capaian pembangunan di Kabupaten Kuningan, masih banyak pekerjaan rumah yang dihadapi pada tahun 2014 yang perlu dipecahkan bersama, antara lain :

1. Daya beli masyarakat Kabupaten Kuningan masih tergolong rendah

Berdasarkan data di bawah ini, dapat terlihat bahwa daya beli masyarakat Kabupaten Kuningan masih tergolong rendah dan upaya yang dilakukan dalam peningkatan indeks daya beli belum membuahkan hasil yang nyata. Tren rata-rata peningkatannya pun sangat kecil setiap tahun hanya meningkat Rp 1.760,00.

Tabel 3.1
Indikator Makro Ekonomi di Bidang Daya Beli

No.	Indikator	Tahun		
		2008	2010	2012
1.	Daya Beli (Rp)	543.660	549.100	550.700
2.	PDRB Konstan (Rp Juta)	3.619.663	3.967.069	4.407.896,69
3.	PDRB perkapita	3.492.871	3.830.737	4.108.382,03
4.	LPE (%)	4,28	4,99	5,91
5.	Inflasi (%)	11,17	6,34	3,62

Sumber data : BPS Kabupaten Kuningan 2011 dan 2012

Daya beli yang rendah merupakan salah satu poros utama penyusun lingkaran setan kemiskinan yang saling terkait. Pendapatan yang rendah menyebabkan terjadinya kemiskinan, dengan kemiskinan tersebut menyebabkan seseorang tidak dapat menjangkau pendidikan yang berkualitas serta membayar biaya pemeliharaan dan perawatan kesehatan.

Lingkaran setan inilah yang menyebabkan sulitnya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, terutama jika kebijakan pemerintah yang dijalankan bukan kebijakan yang pro poor. Hal ini tercermin dari masih minimnya alokasi dana pemerintah daerah yang digunakan untuk peningkatan kualitas pembangunan manusia.

Lingkaran setan perlu dipotong melalui kegiatan yang tidak hanya bersifat sesaat tetapi berkelanjutan yaitu peningkatan aksesibilitas pendidikan, kesehatan serta penciptaan dan perluasan kesempatan kerja

2. Masih terdapat angka pengangguran

Data Suseda tahun 2012 mengungkapkan bahwa masih terdapat pengangguran di Kabupaten Kuningan sebesar 4,13 % atau sebanyak 20.343 orang pencari kerja. Status pekerjaan masyarakat Kabupaten Kuningan didominasi sektor informal sebesar 73,88 % dan hanya 26,12 % saja yang bekerja pada sektor formal. Berdasarkan data tersebut maka solusi yang ditawarkan untuk menekan angka pengangguran dan meningkatkan pekerja sektor formal adalah peningkatan life skill bagi angkatan kerja sehingga penduduk Kabupaten Kuningan memiliki daya saing dan mampu berkompetisi dengan wilayah yang lain.

3. Angka kemiskinan cenderung meningkat

Berdasarkan data PPLS –BPS, jumlah keluarga miskin pada 2008 sebanyak 70.989 RTS, meningkat kembali pada tahun 2011 sebanyak 72.919 RTS. Angka tersebut masih belum memperhitungkan keluarga miskin yang berada pada tataran ambang hampir miskin. Angka kemiskinan tersebut cukup tinggi dan cepat bertambah disebabkan karena masyarakat sangat rentan terhadap dinamika sosial dan ekonomi. Program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan belum cukup efektif dalam menekan angka kemiskinan sehingga perlu sinergi program kegiatan yang dapat menurunkan angka kemiskinan dan memotong arus lingkaran setan kemiskinan.

4. Capaian pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan masih belum optimal

Permasalahan bidang kesehatan di Kabupaten Kuningan berupa : (1) penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan belum memadai, (2) jaminan kesehatan masyarakat miskin belum merata, dan (3) rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.

Ketersediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan belum memadai ditunjukkan dengan rasio perbandingan antara rumah sakit dan puskesmas di Kabupaten Kuningan belum pada posisi ideal. Saat ini rasio perbandingan antara rumah sakit dengan jumlah penduduk adalah 1 : 141.646 (kondisi ideal 1 : 122.402) dan rasio puskesmas sebesar 1 : 30.626 (kondisi ideal 1 : 30.000). Disamping hal tersebut, masih dirasakan pula kekurangan pada penyediaan sarana dan alat kesehatan pada rumah sakit maupun puskesmas.

Data ratio tenaga medis di Kabupaten Kuningan adalah 1 : 698 dari jumlah penduduk, kondisi ideal berdasarkan WHO adalah 1 : 435. Sehingga diperlukan peningkatan kapabilitas tenaga kesehatan baik secara kuantitas maupun kualitas.

Dari aspek belum merata jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, dapat dilihat dari alokasi anggaran pada tahun 2013 untuk dana jaminan kesehatan daerah sebesar Rp 2,5 milyar. Jumlah tersebut belum dapat mencukupi seluruh kebutuhan jaminan masyarakat miskin.

Perilaku merupakan penyebab terbesar masalah kesehatan, untuk itu perlu meningkatkan budaya pola hidup bersih sehat. Sampai saat ini, perilaku hidup bersih sehat masyarakat Kabupaten Kuningan masih perlu ditingkatkan. Data Suseda 2012 menunjukkan bahwa masih terdapat 20.624 Rumah Tangga (6,81%) yang tidak memiliki jamban, 47.523 Rumah Tangga (15,7%) tidak memiliki pembuangan akhir sesuai standar, 15.706 Rumah Tangga (5,19%) memanfaatkan sumber air minum dari sumur tidak terlindung, air sungai, air hujan, dan mata air tidak terlindung.

Pada Bidang Pendidikan, capaian tahun 2012 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Kabupaten Kuningan baru mencapai 8,64 tahun. Bila dibandingkan dengan tahun 2010 kondisi ini mengalami peningkatan sebesar 0,16 poin. Namun apabila kita berharap dapat menuntaskan pendidikan menengah universal 12 tahun maka masih banyak pekerjaan rumah ke depan yang harus diselesaikan, bahkan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun belum tuntas.

5. Perhatian pada pembangunan pertanian dan pariwisata belum optimal

Sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kuningan dan dokumen perencanaan lainnya bahwa sektor pertanian dan pariwisata merupakan core business di Kabupaten Kuningan. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah anggaran di bidang pertanian dan pariwisata masih sangat minim apabila dibandingkan dengan potensi dan visi yang akan dicapai, sehingga dengan kondisi tersebut belum mampu untuk mengembangkan potensi kedua sektor andalan.

Sudah saatnya sebagai core business, bidang pertanian dan pariwisata mendapatkan alokasi anggaran yang proposional dan berimbang, sehingga ke depan kita jangan sampai terlena pada pembangunan fisik dan melupakan pembangunan dalam rangka meningkatkan keberdayaan daerah dan

masyarakat secara ekonomi. Kebijakan pembangunan antarsektor semestinya diarahkan kepada peningkatan kinerja bidang pertanian dan pariwisata, pada akhirnya akan berimbans kepada tumbuhnya sektor andalan di bidang pertanian dan pariwisata sebagai core business di Kabupaten Kuningan.

Berdasarkan data dari APBD Kabupaten Kuningan Tahun 2013, kumulatif belanja urusan dan non urusan untuk bidang pertanian (SKPD DP3, BP4K dan Dishutbun) dibandingkan dengan total APBD hanya 1,05%, sedangkan untuk bidang pariwisata sebesar 0,8%.

6. Pembangunan antar wilayah dan sektor belum merata

Masyarakat kawasan perbatasan merupakan bagian masyarakat Kabupaten Kuningan yang mempunyai hak dasar yang sama dalam menikmati pembangunan. Fokus pembangunan pada kawasan perbatasan dan kawasan terisolir yang selama ini dikembangkan harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan sehingga kawasan perbatasan bukan lagi menjadi kawasan yang termarjinalkan namun harus menjadi pintu gerbang yang mencirikan kemajuan suatu wilayah.

Pembangunan perbatasan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kuningan Tahun 2005 – 2025 juga telah diwadahi melalui pencapaian misi keempat yaitu Mewujudkan pemerataan pembangunan Daerah. Misi ini adalah mewujudkan keseimbangan pelaksanaan pembangunan diantara bagian-bagian wilayah Kabupaten Kuningan berdasarkan permasalahan dan potensi masing-masing melalui distribusi alokasi anggaran dan kegiatan pembangunan yang adil; pengembangan infrastruktur perhubungan di daerah terpencil dan perbatasan; peningkatan daya dukung dan daya tampung daerah perkotaan; peningkatan daya beli; dan peningkatan pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat.

7. Pengembangan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Kondisi dan karakteristik alam yang khas telah memberi pembatas terhadap Kabupaten Kuningan dalam membangun daerah. Berdasarkan kriteria fungsi lahan banyak bagian dari wilayah Kabupaten Kuningan termasuk ke dalam fungsi kawasan lindung (40% dari luas wilayah). Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, khususnya faktor kelerengan lahan, intensitas hujan dan jenis tanah menurut kepekaan terhadap erosi. Kawasan lindung tersebut memiliki fungsi perlindungan sumberdaya alam setempat atau daerah dibawahnya

sehingga harus dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip konservasi sumberdaya alam yang ketat.

Permasalahan pengelolaan sumber daya alam yang saat ini mengemuka adalah menurunnya fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS), indikasi yang muncul berupa masih tingginya tingkat erosivitas dan sedimentasi. Permasalahan lainnya adalah meningkatnya konversi lahan tidak sesuai dengan tata ruang, rendahnya tutupan vegetasi, meningkatnya gangguan terhadap kawasan hutan, dan belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

Pembangunan sektor lingkungan hidup di Kabupaten Kuningan sudah terbilang cukup maju dengan beberapa program khas unggulan daerah dalam rangka menumbuhkembangkan kecintaan kepada lingkungan hidup seperti Pepeling, Apel, Seruling, pembangunan hutan kota dan pembangunan Kebun Raya Kuningan. Sisi ekologis pengelolaan SDALH sudah dapat ditingkatkan hanya saja yang perlu mendapatkan perhatian adalah sisi ekonomi dan sosial budaya. Sangat ironis apabila kita melihat di lapangan, di satu sisi sumber daya alam dapat terpelihara namun masyarakat sekitar kawasan hutan tetap miskin. Apabila ini tetap dibiarkan maka dorongan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya menyebabkan gangguan terhadap kawasan hutan. Lama kelamaan kawasan rusak dan masyarakat tetap miskin. Sehingga perlu terobosan melalui kolaborasi pengelolaan sumber daya alam bersama masyarakat sekitar hutan.

Selain masalah pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup seperti dikemukakan di atas, masalah di bidang pengelolaan sampah dan limbah domestik adalah belum meratanya cakupan pelayanan dalam pengelolaan limbah domestik (sampah limbah rumah tangga), dari 32 kecamatan, baru 11 kecamatan (34,37%) yang diberikan pelayanan dengan 1 lokasi Tempat Pembuangan Akhir. Sehingga perlu langkah inovatif dalam pengelolaan limbah domestik di wilayah yang belum terjangkau pelayanan oleh Pemerintah Daerah, solusi yang ditawarkan adalah dengan melakukan pengelolaan limbah domestik berbasis masyarakat dan merubah pola pikir masyarakat menjadikan sampah sebagai komoditas ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup.

8. Pelayanan publik dan peningkatan SDM aparatur

Aspek yang paling mendasar dari reformasi pelayanan publik yaitu pergeseran pola penyelenggaraan pelayanan publik dari yang semula

berorientasi pemerintah sebagai penyedia (provider), menjadi pelayanan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna (user). Untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan good governance, kebijakan peningkatan kapasitas daerah yang berkesinambungan sangat diperlukan guna meningkatkan kemampuan aparat pemerintahan daerah melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan dan mensejahterakan masyarakat. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah suatu keharusan yang harus segera direalisasikan.

Beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang lebih banyak untuk membiayai Belanja Pegawai yaitu 70% dari total APBD perlu diimbangi dengan kinerja birokrasi yang lebih baik, kinerja tersebut diawali dengan perbaikan manajemen kepegawaian, peningkatan kapabilitas dan kompetensi pegawai, tata laksana dan penerapan prosedur pelayanan publik.

9. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

Berbagai rencana pembangunan yang dimiliki pemerintah semestinya sudah mulai mengajak partisipasi masyarakat. Karena tanpa didukung peran serta masyarakat, pembangunan yang dilaksanakan akan menjadi kurang efektif. Dari tahun ke tahun, proses pembangunan yang dilakukan pemerintah ternyata juga semakin dikritisi oleh masyarakat. Dan dampaknya, tumbuh bias-bias negatif dari masyarakat terhadap proses pembangunan yang sedang atau akan dilakukan. Salah satu gejala negatif yang muncul di tengah masyarakat, yakni tumbuhnya sebuah sikap yang apatis terhadap proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Sekurang-kurangnya, ternyata masyarakat ada yang tidak peduli dengan proses pembangunan yang sedang dan akan dilakukan.

Ini jelas menunjukkan adanya sebuah gejala kurangnya partisipasi masyarakat terhadap agenda pembangunan. Kasus ini misalnya muncul dalam beberapa peristiwa penolakan masyarakat terhadap beberapa proyek pembangunan yang akan dilakukan pemerintah maupun oleh investor. Sebagai contoh adalah Kabupaten Kuningan konsen terhadap pembangunan pariwisata tetapi disisi lain terdapat penolakan pembangunan sarana wisata Sangkan Park oleh elemen masyarakat Desa Sangkanhurip.

Sesuatu yang perlu dimaknai dengan kondisi di atas adalah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah merupakan sinergi dan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat Kabupaten Kuningan,

pemerintah dan swasta. Apabila sinergi ini terbangun maka prinsip good governance dapat terwujud.

3.1.2. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter dan fiskal serta adanya resesi ekonomi di beberapa belahan dunia dewasa ini yang juga memberikan dampak terhadap perekonomian di Kabupaten Kuningan. Capaian indikator ekonomi daerah adalah sebagai berikut :

- Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2000, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kuningan tahun 2011 sebesar 5,43 % dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2000 sebesar 4.182,40 milyar rupiah sedangkan LPE pada tahun 2010 sebesar 4,99 % dengan nilai PDRB sebesar 3,967,07 milyar rupiah. Hal ini patut dipertahankan dan diperlukan upaya lebih besar untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, mengingat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan masih dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 6,48 % dan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,5 %.

Pada tahun 2011 semua sektor ekonomi yang ada pada PDRB mencatat pertumbuhan yang positif, kenaikan tertinggi terjadi pada sektor bangunan yakni sebesar 9,27 %. Jika diurutkan pertumbuhan PDRB menurut sektor ekonomi dari yang tertinggi ke yang terendah maka pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor Bangunan yaitu sebesar 9,27 %, kedua diikuti oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 8,59 %, ketiga Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar 8,40 %. Sektor ekonomi keempat tertinggi pertumbuhannya yaitu Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 7,42 %. Kelima sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih sebesar 6,95 %. Keenam adalah sektor Jasa-Jasa sebesar 5,00 %. Urutan ketujuh diduduki oleh sektor Pertambangan dan

Penggalian sebesar 4,63 %. Kedelapan Industri sebesar 4,39 persen. Terakhir sektor Pertanian yang menyumbangkan 1,94 persen.

Tabel. 3.2
PDRB Kabupaten Kuningan menurut sub sektor atas dasar harga konstan 2000 tahun 2009-2011 (Jutaan Rupiah)

LAPANGAN USAHA		TAHUN		
		2009	2010*	2011**
(1)		(2)	(3)	(4)
1	PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	1.272.781,00	1.282.605,90	1.307.450,06
2	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	26.998,82	27.222,91	28.482,89
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	85.667,73	92.849,98	96.926,23
4	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	16.642,98	92.849,98	96.926,23
5	BANGUNAN	164.243,94	172.866,75	188.891,49
6	PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	848.542,11	925.238,40	1.004.696,24
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	282.126,14	303.476,18	325.989,02
8	KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	238.410,31	256.493,06	278.031,83
9	JASA-JASA	843.285,66	888.698,96	933.091,97
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		3.778.698,69	3.967.069,13	4.182.401,91

Tabel 3.3
LPE Kabupaten Kuningan menurut sub sektor atas dasar harga konstan 2000 tahun 2009-2011 (Jutaan Rupiah)

LAPANGAN USAHA		LAJU PERTUMBUHAN		
		2009	2010*	2011**
(1)		(2)	(3)	(4)
1	PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN	0,82	0,77	1,94
2	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	1,84	0,83	4,63
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	6,65	8,38	4,93
4	LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH	3,92	5,85	6,95
5	BANGUNAN	2,39	5,25	9,27
6	PERDAGANGAN, HOTEL DAN LESTORAN	8,00	9,04	8,59
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	2,31	7,57	7,42
8	KEU. PERSEWAAN, & JASA PERUSAHAAN	6,87	7,58	8,40
9	JASA-JASA	6,82	5,39	5,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		4,39	4,99	5,43

- Struktur Ekonomi

Struktur Ekonomi Kabupaten Kuningan walaupun masih didominasi oleh sektor pertanian namun pertumbuhannya mengindikasikan kecenderungan yang

menurun dan masih jauh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pada tahun 2011 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Kuningan sebesar 1.307.45 milyar rupiah atau 28,14 % dari total PDRB keseluruhan meningkat 1,94 % dari tahun sebelumnya.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan dan stabil pertumbuhannya tidak kurang dari 8 % per tahun, kontribusi sektor ini pada tahun 2011 yaitu sebesar 21,40 % dan bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan sektor ini akan menjadi tulang punggung perekonomian di Kabupaten Kuningan.

- Inflasi

Inflasi Kabupaten Kuningan pada tahun 2011 sebesar 4,24%, di bawah laju pertumbuhan ekonomi tahun 2011 yaitu sebesar 5,43 % dengan demikian adanya peningkatan pendapatan masyarakat Kuningan dapat diikuti pula oleh peningkatan daya belinya.

Indeks Harga Implisit menunjukkan tingkat inflasi untuk masing-masing sektor atau sub sektor setiap tahunnya. Inflasi tertinggi terjadi pada sektor Industri, kenaikan harga bahan-bahan industri mengakibatkan inflasi pada sektor industri naik sebesar 5,54 %, Sedangkan Inflasi terkecil terjadi pada sektor bangunan yakni sebesar 2,26 %.

- Ketenagakerjaan

Momentum pertumbuhan ekonomi yang terjaga pada tahun 2011 telah menciptakan lapangan kerja baru dan sekaligus menurunkan angka pengangguran terbuka Kabupaten Kuningan. Pengangguran terbuka didefinisikan adalah penduduk usia kerja yang sama sekali tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau menyiapkan usaha. Pada tahun 2012 TPT penduduk Kabupaten Kuningan mencapai 4,13 %, atau turun 1,04 % bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2010.

Dilihat menurut aspek laki-laki dan perempuan, tampaknya pengangguran terbuka perempuan proporsinya dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan pengangguran terbuka laki-laki, yaitu TPT perempuan sebesar 6,43 persen, sedangkan TPT laki-laki hanya sebesar 3,12 persen. Tingginya angka TPT perempuan dibanding laki-laki, diduga karena aspirasi penduduk perempuan dalam hal mencari kerja semakin meningkat.

Tabel 3.4
Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas, Angkatan Kerja, Bekerja, Mencari Kerja, TPAK, TPT, dan TKK Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kuningan, Tahun 2010 – 2012

Indikator	2010			2012		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1. Penduduk Usia 10 tahun ke Atas	463.051	466.823	929.874	471.613	473.505	945.118
2. Angkatan Kerja	347.177	178.593	525.770	341.576	150.672	492.248
3. Bekerja	334.042	164.570	498.612	330.917	140.988	471.905
4. Mencari Kerja	13.135	14.023	27.158	10.659	9.684	20.343
5. TPAK	74,98	38,26	56,54	72,43	31,82	52,08
6. TPT	3,78	7,85	5,17	3,12	6,43	4,13
7. TKK	96,22	92,15	94,83	96,88	93,57	95,87

Sumber : Suseda Kab. Kuningan 2010, 2012

Keterangan : L = Laki-laki ; P = Perempuan

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) tahun 2012 sebesar 95,87 % meningkat dibandingkan tahun 2010 yang sebesar 94,83 %, dan penduduk laki-laki memperoleh kesempatan kerja lebih besar dibandingkan penduduk perempuan, TKK laki-laki sebesar 96,88 % sedangkan TKK perempuan sebesar 93,57 %.

- Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kuningan terlihat persentasenya semakin menurun. Pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kuningan sebanyak 150.270 jiwa, atau sebesar 14,20 % menurun 0,48 % dari tahun sebelumnya. Penurunan angka kemiskinan ini juga diharapkan diikuti dengan penurunan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah. Kemandirian masyarakat untuk berusaha keluar dari permasalahan-permasalahan sosial dan ekonomi yang menjeratnya agar dapat meningkat seiring bertambahnya pendapatan masyarakat dan iklim berusaha yang semakin membaik.

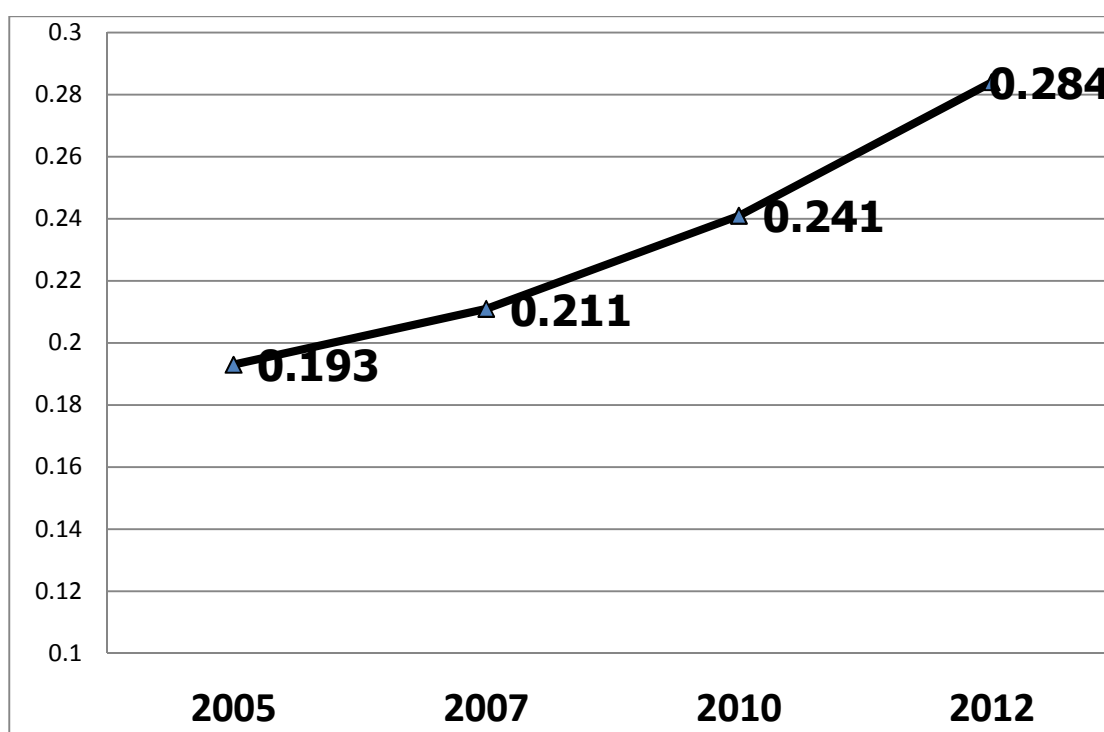
Tabel 3.5
Penduduk Miskin di Kabupaten Kuningan, tahun 2008 - 2011

URAIAN	2008	2009	2010	2011
JUMLAH KK	298.446	308.921	315.017	315.989
PENDUDUK MISKIN (000)	182,05	174,79	152,40	150,27
% PENDUDUK MISKIN	16,75	15,91	14,68	14,20

- Rasio Gini (*Gini Ratio*)

Rasio gini adalah ukuran yang menunjukkan ketimpangan pendapatan di masyarakat. Nominal rasio gini membentang dari nol sampai satu, di mana nol menunjukkan pemerataan dan satu melambangkan ketimpangan. Adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi saat ini ternyata belum memberikan pemerataan hasil-hasil pembangunan secara adil terhadap seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini tercermin pada gini ratio Kabupaten Kuningan yang trennya dari tahun ke tahun meningkat walaupun tidak terlalu tinggi namun hal ini tetap perlu diwaspadai.

Gini Ratio , Kabupaten Kuningan, Tahun 2005 – 2012



3.1.3. Tantangan dan Prospek Ekonomi Tahun 2014

Melihat perkembangan perekonomian Kabupaten Kuningan tahun 2010-2011, proyeksi perekonomian tahun 2013, perekonomian Kabupaten Kuningan pada Tahun 2014 dan tahun-tahun berikutnya diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang positif. Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian Kabupaten Kuningan serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- Tantangan

- 1) Tema pembangunan Kabupaten Kuningan pada tahapan pembangunan 2014 – 2018 yaitu Pemantapan Kemandirian Masyarakat memberikan tantangan bagi kita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Kuningan yang memiliki kemandirian tinggi dalam membangun kehidupannya. Kemandirian tersebut seyogyanya merupakan implikasi dari berkembang pesatnya bidang pertanian dan pariwisata di Kabupaten Kuningan, sehingga kinerja 2 (dua) sektor ini menjadi prioritas utama dalam rangka meningkatkan perekonomian di Kabupaten Kuningan. Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam memacu kinerja dan produktivitas sektor ini menjadi sangat vital, ditengah terjadinya pelambatan pertumbuhan di sektor pertanian beberapa tahun ini.
- 2) Wujud kemandirian masyarakat Kabupaten Kuningan tercermin dalam rendahnya tingkat ketergantungan terhadap pemerintahan daerah, tingginya daya beli, tingginya sikap positif dan tingkat partisipasi swakarsa masyarakat dalam pembangunan. Hal ini juga menjadi pekerjaan rumah yang tidak sederhana ditengah-tengah ketergantungan masyarakat yang masih tinggi serta koefisien daya beli Kabupaten Kuningan yang tergolong rendah dibandingkan dengan indeks pendidikan dan kesehatan masyarakat yang tertuang dalam laju Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kuningan.
- 3) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pun masih dirasakan kurang, perlu kerja keras pemerintah dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunanpun memberikan pahala yang setimpal dengan partisipasi masyarakat dalam membangun rumah ibadah, pondok pesantren, rumah yatim piatu dan lain sebagainya.

Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-private partnership*) menjadi penting ditengah terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.
- 4) Mencapai pertumbuhan ekonomi secara inklusif. Hal ini harus terus diupayakan dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan serta mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan

kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, dan dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

- 5) Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Ini adalah tantangan cukup besar bagi pemerintah dewasa ini mengingat investasi merupakan salah satu penggerak kegiatan ekonomi daerah. Komitmen perbaikan iklim investasi tersebut menjadi kewajiban pemerintah yang harus dilakukan dengan mengadakan perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan, pelayanan, dan penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan birokrasi.
- 6) Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Selain itu infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan sosial.
- 7) Membangun landasan yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan daerah tidak lagi dapat didasarkan pada pembangunan ekonomi semata, tetapi harus didasarkan pada pembangunan yang berkelanjutan dengan memenuhi kriteria ekonomis, bermanfaat secara sosial, didukung oleh kelembagaan yang memadai, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

- Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013-2014

Berdasarkan kondisi riil perekonomian daerah tahun 2011 dan perkiraan tahun 2012, maka prospek perekonomian pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Pertumbuhan ekonomi tahun 2012 dan tahun 2013 diperkirakan akan terus menguat. Pada tahun 2014 perekonomian diharapkan kembali tumbuh pada kisaran angka 4,5 % – 5,5 %. Inflasi pada tahun 2014 juga diperkirakan masih di bawah angka dua digit meskipun muncul wacana kenaikan tarif dasar listrik

(TDL) dan kenaikan BBM. Dengan kondisi diatas, diharapkan tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2014 akan tetap di bawah 5 %, dan angka kemiskinan diperkirakan menurun pada kisaran 13,16 % - 11,39 %.

Tabel 3.6
Indikator Makro Kabupaten Kuningan

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Bertambah /Berkurang	Proyeksi	
			Tahun 2011	Tahun 2012		Tahun 2013	Tahun 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Angka Agregatif)	Rp	10.018.854,58	10.251.119,40*	232.264,82	10.488.768,76	10.731.927,49
2	PDRB atas Dasar Harga Konstan 2000 (Angka Agregatif)	Rp	4.182.401,91	4.407.896,69*	55.268,49	4.465.763,49	4.524.389,96
3	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Berlaku Tahun Tertentu	%	9,72	9,29*	-0,43	8,87	8,47
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Angka Agregatif)	%	5,43	5,91*	0,48	6,04	6,17
5	Inflasi (Angka Agregatif)	%	4,07	3,62*	-0,45	3,22	2,87
6	Jumlah Penduduk Miskin	%	14,20	14,09*	-0,11	13,97	13,85
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,61	4,13	-0,48	4,02)	3,91
8	Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan:						
	- Pendapatan Perkapita	Rp	3.967.434,41	4.108.382,03*	140.947,62	4.144.237,57	4.180.406,04
	- Besaran Indeks Gini (Gini Ratio Index)		0,263	0,28	-	-	-
	- Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia)		72,82	72,89	0,07	72,91	72,93

Sumber : BPS Kab. Kuningan (SUSENAS Tahun 2008-2011), PDRB Kab. Kuningan Tahun 2009-2011, SUSEDA Kab. Kuningan Tahun 2012 dan Bappeda Kab. Kuningan Tahun 2013.

Keterangan :

*) : Data Sementara

3.1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2014

- Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan dan Inklusif

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah mencapai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk menampung penambahan angkatan kerja dan mengurangi angka pengangguran serta meningkatkan pendapatan masyarakat Kabupaten Kuningan.

Untuk lebih meningkatkan peluang pertumbuhan ekonomi Kuningan kedepan, beberapa langkah prioritas tahun 2014 sebagai berikut :

1) Pemantapan Kinerja Sektor Pertanian

Perlunya pemantapan kinerja sektor pertanian mengingat sektor ini merupakan penyerap tenaga kerja tertinggi di Kabupaten Kuningan, sebesar 32,66 % penduduk Kabupaten Kuningan bekerja di sektor ini pada tahun 2012, dengan peningkatan kinerja sektor pertanian juga sangat menunjang peningkatan PDRB. Struktur ekonomi Kabupaten Kuningan walaupun dipengaruhi oleh sektor pertanian namun dari tahun ke tahun kontribusinya terhadap PDRB semakin menurun. Adanya peralihan lahan dari lahan pertanian ke bukan lahan pertanian (perumahan, bangunan, gedung, dll) menyebabkan berkurangnya lahan pertanian sehingga walaupun kontribusi sektor pertanian paling dominan namun dilihat dari peningkatan produksi cenderung menunjukkan penurunan, terutama tanaman bahan makanan. Untuk mengantisipasi penyempitan lahan pertanian maka perlu diperhatikan bagaimana mengubah pola pengolahan sektor pertanian tradisional menjadi pengolahan lahan pertanian yang berteknologi tinggi.

2) Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas ekonomi akan menjadi kurang berarti apabila hanya dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil rakyat yang menikmati peningkatan kesejahteraan rakyat sehingga tidak sesuai dengan tujuan pembangunan bidang ekonomi. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan merupakan elemen penting yang menjamin pengembangan ekonomi agar dapat dinikmati oleh semua rakyat secara adil.

Pembangunan ekonomi inklusif adalah pembangunan yang memberikan kesempatan pada seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses pertumbuhan ekonomi dengan status yang setara, terlepas dari latar belakang mereka. Dengan demikian, pembangunan ekonomi inklusif menciptakan kesempatan bagi semua dan memastikan akses yang sama terhadap kesempatan tersebut. Pencapaian pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan didukung oleh kebijakan pada sektor tenaga kerja, kemiskinan, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Di sisi kebijakan tenaga kerja, kebijakan-kebijakan seperti pelatihan, pembekalan, pengembangan sekolah menengah kejuruan (SMK) dapat memberikan tambahan skill bagi tenaga kerja sehingga memudahkan untuk

dapat mengisi lowongan kerja yang tersedia. Dengan begitu, semakin banyak orang terlibat dalam proses pembangunan.

Terkait dengan kebijakan pengurangan kemiskinan, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan memiliki kaitan yang sangat erat. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan dapat memiliki dampak positif terhadap agenda pengurangan kemiskinan. Dalam kerangka ekonomi tersebut, masyarakat yang selama ini miskin karena tidak pernah mendapat kesempatan, dapat memanfaatkan kesempatan yang ada untuk keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, kebijakan pengurangan kemiskinan melalui pemberian bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan dan kesehatan) juga akan memberikan dukungan pada terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Di samping kebijakan di ketenagakerjaan dan kebijakan dalam pengurangan kemiskinan, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan harus didukung oleh kebijakan UKM untuk pengembangan UKM. Dengan keterbatasan sektor formal untuk menampung tenaga kerja, kesempatan bagi mereka yang tidak tertampung untuk turut serta dalam proses pembangunan adalah melalui sektor-sektor informal. Oleh sebab itu, pengembangan UKM penting dilakukan, baik pengembangan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan keterbatasan dana dan peningkatan kemampuan SDM dalam bentuk pemberian pelatihan yang memungkinkan UMKM dapat berkembang dengan kemampuannya sendiri.

- Peningkatan Investasi

Investasi memegang peran penting bagi pertumbuhan ekonomi karena akan menciptakan akumulasi modal yang dapat mendorong peningkatan produktivitas. Perlu upaya perbaikan iklim investasi yang terus-menerus dalam rangka meningkatkan gairah investasi di Kabupaten Kuningan. Dengan terciptanya iklim investasi yang kondusif diharapkan menambah minat dan realisasi investasi ke Kabupaten Kuningan.

Investasi di Kabupaten Kuningan saat ini masih didominasi untuk sektor padat modal, seperti sektor property, keuangan dan perbankan, sehingga investor perlu didorong ke sektor-sektor sekunder maupun jasa yang bisa lebih menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.



Penggalian potensi-potensi investasi baru perlu ditumbuhkan disamping pengembangan potensi-potensi investasi yang sudah ada dengan promosi investasi yang terus menerus dibarengi peningkatan kualitas informasi investasi yang semakin baik. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan melalui pelayanan satu atap (*one stop service*) harus terus dilakukan melalui efisiensi dan efektivitas pelayanan yang dapat memberikan pelayanan yang prima bagi para investor.

- Pembangunan Ekonomi Hijau (*green economy*) dalam kerangka Kabupaten Konservasi

Dalam rangka pembangunan Kabupaten Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi, perlu ditunjang dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Kuningan yang konsisten dalam mendukung hal tersebut. Salah satu konsep pembangunan yang baru-baru ini digagas adalah pembangunan ekonomi hijau (*green economy*).

Green economy menurut UNEP (*United Nations Environment Programme*) ialah aktifitas ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan dan

kesetaraan manusia, sekaligus secara signifikan mengurangi kerusakan lingkungan dan kelangkaan sumberdaya alam. Namun argumen yang dibangun dalam *green economy* ini untuk memberikan nilai ekonomi pada sumberdaya alam yang selama ini merupakan barang publik akan memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk lebih menghargai nilai kegunaannya dan tidak menyia-nyiaakan penggunaannya. Model *green economy* dibangun dengan visi “modernisasi ekologi” dimana pertumbuhan ekonomi dan konservasi lingkungan bekerja beriringan. Ekonomi hijau ingin menghilangkan dampak negatif pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam.